

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa :

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas - batas kewenangan daerah, dan keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke dalam APBD.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati – hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen pengelolaan, anggaran pengelolaan menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut unsur pokok keuangan daerah terdiri atas:

- Hak Daerah
- Kewajiban Daerah
- Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Renyowijiyono (2008 : 75) Daur anggaran pemerintah RI dikelompokkan dalam 5 tahap yaitu :

1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR.
2. Pembahasan dan pengesahan RUU-APBN dan Penetapan UU-APBN oleh DPR.
3. Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan Negara oleh Pemerintah.
4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK.
5. Pembahasan dan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan penetapan UU-Laporan pertanggungjawaban APBN oleh DPR.

Pada dasarnya prinsip - prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik. Menurut buku Henley (1990 : 65) yang dikemukakan oleh Mardiasmo berpendapat bahwa “siklus anggaran memiliki empat tahap yang terdiri dari (1) tahap persiapan (*preperation*), (2) tahap ratifikasi (*ratification*), (3) tahap implementasi (*implementation*) dan (4) tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*)”.

2.1.2 Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), adalah suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum (sektor publik) dengan baik.

Maryono, Warella, Kismartini (2007 : 48) mengemukakan “*World Bank* mengusung tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam *Good Governance* yaitu (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam management sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi – fungsinya”.

Selanjutnya Soleh dan Rochmansjah (2010 : 10) juga mengemukakan “prinsip-prinsip pengelolaan keuangan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian”.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat.

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada *Stakeholder*

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *good-governance* (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan *good-governance* yang meliputi:

1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
4. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;

5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
6. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
7. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;

2.1.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Sulistioni (2003 : 99), Pemerintah yang Akuntabel adalah Pemerintah yang memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat;
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik;
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan;
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan
- 5) Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Mahmudi (2010 : 23), akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggung-jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat - lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

2.1.4 Transparansi (*Transparency*)

Menurut Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto (2012 : 42) menjelaskan transparansi adalah :

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Sopamah dan Mardiasmo (2003 : 33) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria yaitu :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut: (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai *stakeholder* dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan Peraturan Daerah yang *accountable* dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

2.1.5 Value for Money (VFM)

Menurut Mardiasmo (2002 : 90) yang dikemukakan oleh Renyowijoyo “*Value For Money (VFM)* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektifitas”.

Ekonomi merupakan perolehan pemasukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *Outcome* dengan *Output*. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *Value For Money (VFM)* sedangkan tambahan dua elemen lain yaitu keadilan (*Equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*Equality*).

Menurut Ulum (2009 : 145) pembahasan *Value for Money (VFM)* menyangkut apa yang dikenal dengan 3 E yaitu :

1. Ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati - hati / cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Efisiensi adalah perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*Cost of Output*). Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan dana yang serendah - rendahnya (*spending well*).
3. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *Value for Money* yang berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3-E) dalam proses penganggaran yaitu : ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya; efisiensi, merupakan ukuran pengguna dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan output maksimal (ber-daya guna); dan efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, pengelolaan dan prosedur untuk dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan merupakan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep *Value for Money (VFM)* ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks ekonomi daerah *VFM* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. *VFM* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel
1.	<p>Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for Money</i>, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat)</p> <p>Syahputra, Ricky Ari (2018).</p>	<p>X₁: Akuntabilitas Keuangan Daerah</p> <p>X₂: <i>Value for Money</i></p> <p>X₃: Kejujuran</p> <p>X₄: Transparansi</p> <p>X₅: Pengawasan</p> <p>Y: Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat.</p> <p>2. <i>Value for Money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat.</p> <p>3. Kejujuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat.</p> <p>4. Transparansi berpengaruh</p>	<p>1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel independen yang sama, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan <i>Value for Money</i>.</p> <p>2. Meneliti dengan variabel dependen yang sama yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Variabel independen yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu Kejujuran dan Pengawasan.</p> <p>2. Objek penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat, sedangkan peneliti meneliti di Pemerintah Kota Palembang</p>

			<p>positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat.</p> <p>5. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat.</p> <p>6. Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for Money</i>, Kejujuran, Transparansi, Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Labuhan Batu Pusat.</p>		
2.	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi	X_1 : Akuntabilitas Keuangan X_2 : Pengawasan Keuangan	1. Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap	1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independen yang sama	1. Variabel independen yang berbeda dengan penelitian terdahulu

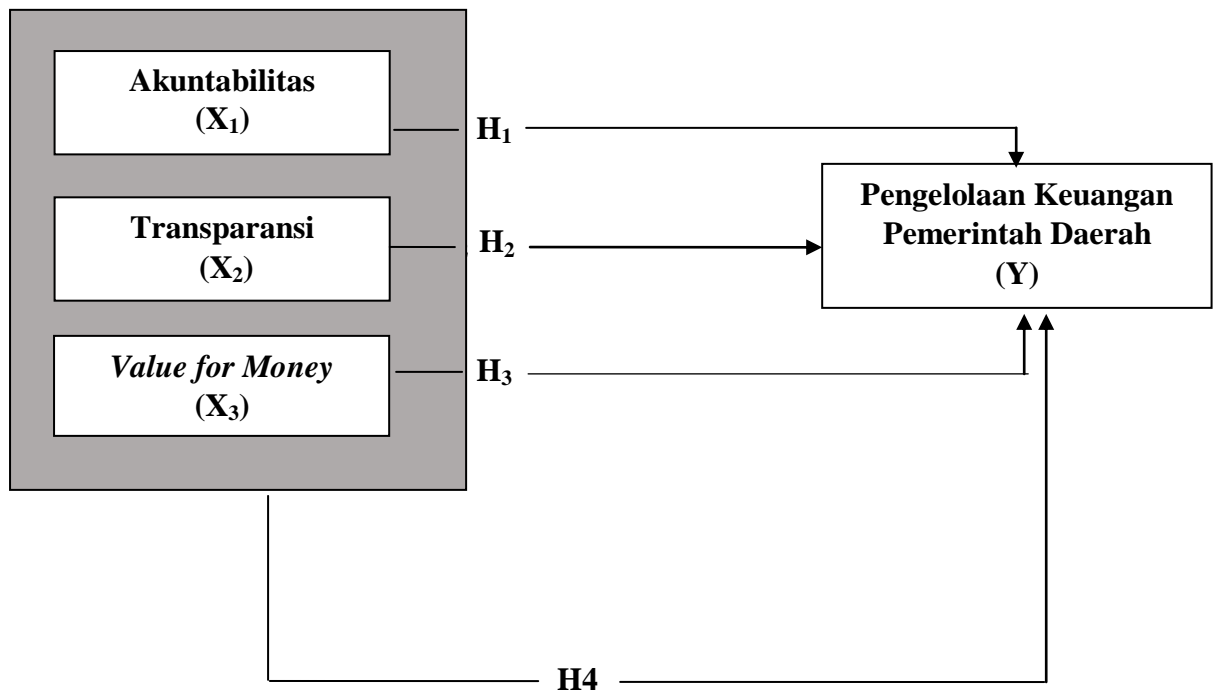
	<p>Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu</p> <p>Putra, Gerryan (2017).</p>	<p>Daerah</p> <p>X_3: Transparansi Anggaran</p> <p>Y: Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>3. Transparansi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.</p>	<p>yaitu Akuntabilitas dan Transparansi</p> <p>2. Meneliti dengan variabel dependen yang sama yaitu Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>yaitu Pengawasan Keuangan</p> <p>2. Objek penelitian terdahulu yaitu di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan peneliti meneliti di Pemerintah Kota Palembang</p>
3.	<p>Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Umami, Risyah, dkk.</p>	<p>X_1: Transparansi</p> <p>X_2: Akuntabilitas</p> <p>Y: Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>1. Pengujian secara parsial menunjukkan variabel Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan</p>	<p>1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independen yang sama yaitu Transparansi dan Akuntabilitas</p>	<p>1. Variabel dependen yang berbeda yaitu Pengelolaan Keuangan Desa</p>

			<p>Desa</p> <p>2. Pengujian secara parsial menunjukkan variabel Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>3. Nilai R square sebesar 63,68% menunjukkan variabel-variabel transparansi dan transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan 36,32% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.</p>		
4.	<p>Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah di Kabupaten Dairi.</p>	<p>X₁: Akuntabilitas</p> <p>X₂: Transparansi</p> <p>Y: Pengelolaan Keuangan berkonsep <i>Value for</i></p>	<p>1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep <i>Value for Money</i></p>	<p>1. Meneliti dengan menggunakan variabel independen yang sama yaitu Akuntabilitas dan Transparansi</p>	<p>1. Meneliti dengan variabel dependen yang berbeda yaitu Pengelolaan Keuangan berkonsep <i>Value For</i></p>

	Nababan, Redi Antonius, dkk (2018).	<i>Money</i>	2. Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep <i>Value for Money</i> 3. Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep <i>Value for Money</i>		<i>Money</i> , sedangkan peneliti menggunakan variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Kabupaten Dairi, sedangkan peneliti meneliti di Pemerintah Kota Palembang.
5.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang Trianto, Anton (2015).	X ₁ : Efektivitas X ₂ : Efisiensi Y: Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Efektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang 2. Efisiensi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang	1. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang 2. Meneliti dengan objek yang sama yaitu Pemerintah Kota Palembang.	1. Variabel dependen yang berbeda yaitu Efektivitas dan Efisiensi, sedangkan variabel dependen peneliti yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan <i>Value for Money</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang mengacu kepada tujuannya yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya didukung oleh salah satu prinsipnya yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas atau yang biasa disebut dengan pertanggungjawaban sejatinya menjadi faktor agar laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat

menggambarkan pemerintahan yang dapat dipercaya oleh publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricky Ari Syahputra (2018) bahwa pada penelitiannya yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Pusat.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H₁ : Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

2.4.2 Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan salah satu upaya membangun kepercayaan publik pada pemerintah. Dengan sebagai upaya membangun kepercayaan, diharapkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sejatinya dapat diakses oleh masyarakat luas agar dapat tercipta transparansi *horizontal* maupun *vertical* antara pemerintah dan masyarakat (*public*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antonius, dkk (2018) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value for Money* di Pemerintah Kabupaten Dairi.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H₂: Transparansi secara parsialberpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

2.4.3 Hubungan *Value for Money* dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Value for Money yang memiliki prinsip Ekonomis, Efektif, dan Efisien (3E) sejatinya sangat diperlukan dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan keuangan pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik sejatinya harus lah ekonomis, efektif, dan

efisien sehingga dapat menjadi dasar penyusunan anggaran ditahun berikutnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricky Ari Syahputra (2018) yang menyatakan bahwa *Value for Money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H₃: *Value for Money* secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

2.4.4 Hubungan Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penulis menghipotesiskan sebagai berikut :

H₄: Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.